

ABSTRAK

Muhammad Danindra Cahya Akassah : Pelaksanaan Peran BPOM Bandung Dalam Mengawasi Peredaran Obat Tradisional Jamu Di Kota Bandung Dihubungkan Dengan Pasal 2 Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2017 Tentang Badan Pengawas Obat dan Makanan.

BPOM yang telah diberi amanah oleh pemerintah sesuai Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2017 harus mengecek produk obat sebelum beredar di pasaran juga melakukan pengawasan terhadap obat-obatan yang telah beredar dipasaran agar hak konsumen tidak dilanggar tetapi fakta dilapangan masih banyak obat ilegal dan berbahaya yang di perjual belikan.

Berdasarkan dengan hal tersebut, penelitian ini merumuskan beberapa permasalahan mengenai pelaksanaan peran BPOM dalam mengawasi obat tradisional, kendala BPOM dalam mengawasi obat-obat tradisional ilegal dan mengandung zat berbahaya, upaya apa yang BPOM lakukan untuk memberantas obat-obatan ilegal dan mengandung zat berbahaya agar tidak lagi beredar dipasaran lagi.

Pemikiran ini bertolak dari Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2017 Tentang Badan Pengawas Obat dan Makanan. Teori yang digunakan dalam penelitian ini adalah teori perlindungan hukum dan teori pengawasan.

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian *deskriptif analisis*. Metode penelitian deskriptif analisis yaitu menggambarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dikaitkan dengan teori-teori hukum dalam praktek pelaksanaan hukum yang menyangkut masalah yang diteliti.

Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bentuk pengawasan berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2017 yang dilakukan BPOM di Bandung adalah melakukan pengawasan secara *pre market* dan juga *post market*. namun yang terjadi dilapangan masih banyak obat tradisional yang ilegal ditemukan yang dapat merugikan konsumen. Kendala yang BPOM hadapi diantaranya masih rendahnya pengetahuan dan kesadaran pelaku usaha untuk mendaftarkan obat-obat yang mereka buat. Upaya yang BPOM lakukan BPOM menjalin kemitraan dengan berbagai pihak, mulai dari kepolisian, kejaksaan, dan pengadilan. Membuka forum dengan produsen produsen untuk mengetahui Informasi peredaran obat palsu. BPOM akan memasang aplikasi QR Code untuk menjamin keaslian obat, Selanjutnya BPOM sering melakukan penyuluhan kepada masyarakat dan pelaku usaha dan juga membuka unit pelayanan informasi konsumen.